

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adji, Oemar Seno. Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum. (Jakarta : Simposium UI, 1966)
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012)
- A. Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Anwar. Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara. (Malang: Intrans Publishing, 2011)
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. (Jakarta: Kencana, 2018)
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno. Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi. (Setara Press: Malang, 2010)

- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Jimly Assiddiqie. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945. (Yogyakarta: UU Press, 2004)
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. (Bandung : Nuansa,2009)
- Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. (Jakarta : Rajawali, 2010)
- Marsono. Pemilihan Umum 1997 : Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan. (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Maruar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta : Konstitusi Press, 2005)
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Mochtar Kusumaatmadja. Kerangka Penegakan Hukum Nasional. (Alumni: Bandung, 1995)
- Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. (Alumni: Bandung, 2002)
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi. (Peradaban: Jakarta, 2007)

Ronny Haniatjo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990)

Sandu Suyoto dan Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015)

Srijanti, dkk. Etika Berwargunegara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Subhan Mahfud. Keadilan Hukum dan Kemanusiaan. (Visipress: Surabaya, 2008)

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Titik Triwulan Tutik. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945. (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006)

Victor Situmorang. Intisari Ilmu Negara Cetakan pertama. (Bina Aksara : Jakarta, 1987)

2. JURNAL

H.M. Soerya R. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 43 Nomor 3, 2013

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Menguraikan Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, Juni 2020

Mohamad, Faisal Ridho. Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8e, 2017

Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi, (Revita Aditama :Bandung, 2010)

Nanang Sri Darmadi, SH., MH. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume XXVINomor 2, Agustus 2011

Triono. Menakar Efektivitas Pemilihan Umum Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2017

Umbu Rauta. Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif. Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4. DISERTASI

Dahlan Thaib, Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran (Bandung : Alumni, 2007)

5. KAMUS

Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Jakarta, 1988)

6. INTERNET

Rakhmat Nur Hakim.Yusril : Kalau Hanya 2 Paslon dan Diulang Terus, Tak Jelas Kapan Pilpres Berakhir. (Kompas, 8 Juli 2020)

Wahyu Ardianti Woro Seto.Mahfud MD Jelaskan Syarat Jokowi atau Prabowo yang Bisa Menangkan Pilpres”. (Tribun Jateng, 21 April 2019)

Yudo Dahono. Refly Harun : Pemenang Pilpres 2019 Ditentukan Suara Terbanyak. (Berita Satu, 20 April 2019)

Yustinus Paat. Pilpres 2019, Yusril : Penentuan Pemenang Berdasarkan Suara Terbanyak.(Berita Satu, 20 April 2019)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : ---
Hal : Penggantian Judul Penulisan Hukum

Yth. **Wakil Dekan Akademik dan Mahasiswa**
u.b. Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Hukum UNDIP
di Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa selaku Pembimbing I / Pembimbing II dan setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Penulisan Hukum mahasiswa tersebut dibawah ini, kami mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

Nama : Erwina Kasih Cristhaulina Silalahi
NIM : 11000118120170
Nomor HP : 0821-6354-0085
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM.

Judul Awal : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019
Terhadap Potensi Pengulangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Judul Revisi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019
Terhadap Potensi Putaran Kedua Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kami berharap, perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam Sistem Informasi Akademik (SIMAK) Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan dikemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP.198905211914042001

Semarang, 22 Februari 2022
Pembimbing I / Pembimbing II,


Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP.196208011987032001

Tembusan:

- Mahasiswa yang bersangkutan